



RANKHIR 2024

RENCANA KERJA (RENJA)



**PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmad dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua serta tidak lupa juga mengucapkan salawat dan salam kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari alam kegelapan kealam yang lebih beriman dan berpendidikan sebagaimana saat ini sehingga ***Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2024*** telah diselesaikan. Penyusunan Rankhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJPM dan RKPD menyebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Akhir RKPD mencakup penelaahan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Sementara itu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh di susun dan buat berdasarkan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.**

Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dijabarkan melalui Rankhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan bahagian yang tidak

terpisahkan dari suatu rencana yaitu Rencana Strategis (Renstra) selama kurun waktu lima tahun Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026 yang telah merencanakan pembangunan dan Program Prioritas selama lima tahun mendatang. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan yang lebih tepat dimasa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan dan pertimbangan sumberdaya yang tersedia. Oleh sebab itu, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan suatu perencanaan tahunan yang dikenal dengan perencanaan kerja untuk dituangkan dalam Rankhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, Rancangan Awal Renja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah untuk menjawab tuntutan dan perubahan lingkungan yang begitu cepat dalam kurun waktu satu tahun mendatang serta issue strategis, baik yang berasal dari dalam (*internal*) maupun yang berasal dari luar (*eksternal*) organisasi. Dengan adanya pendekatan dan sinergi serta berkesinambungan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, dengan memperhitungkan kekuatan dan peluang yang ada serta kelemahan dan ancaman yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah.

Untuk itu kita harapkan Rankhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dapat menjadi pedoman dan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bahan

RANKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2024

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh periode tahunan dan lima tahunan. Dalam penyusunan dokumen Renja tentunya masih terdapat kekurangan, namun upaya untuk melakukan penyempurnaan akan terus dilakukan demi terwujudnya administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Akhirnya mengingat Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun merupakan dasar untuk menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai komitmen bersama bagi jajaran pimpinan dan aparatur di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka diharapkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi tercapainya visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Banda Aceh, Juli 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan,



IR. CUT HUZAIMAH, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660217 199203 2 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT ACEH TAHUN LALU	16
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2022. <i>Tabel T-C. 29</i>	16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. <i>Tabel T-C. 30</i>	39
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.....	43
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPA Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. <i>Tabel T-C. 31</i>	49
BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT ACEH	54
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	54
3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2024	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	89
BAB V PENUTUP.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 1 huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menyebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup Penelaahan dokumen Rancangan Awal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh yang berperan dalam membangun dibidang Pertanian memerlukan sistem perencanaan secara simultan yang mempertimbangkan faktor kondisi riil wilayah/daerah, anggaran, kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Penganggaran dan perencanaan berbasis kinerja diarahkan pada

perencanaan yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan yang dimiliki oleh SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk melaksanakan tugas serta pekerjaan percepatan pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan secara lebih maju menuju swasembada pangan berkelanjutan. Oleh karena itu Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Awal Tahun Anggaran 2024 sebagai bagian dari Rencana Akhir Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023-2026 dan Rencana Pemerintah Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Akhir Tahun Anggaran 2024 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dilakukan dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down*, *bottom-up* dan *money follow program*. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir yang merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui musrenbang, Pendekatan politis adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berupa kebijakan-kebijakan kepala daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), hasilnya akan diselaraskan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sistem penganggaran sebelumnya masih menggunakan sistem *money follow function*, dimana anggaran mengikuti tugas dan fungsi pada kementerian lembaga. Sejak

tahun 2023, anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, inilah yang disebut *Money Follow Program*, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran.

Melalui pendekatan ini diharapkan :

1. Adanya skala prioritas alokasi yang tinggi pada program-program yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat;
2. Program dan kegiatan yang akan didanai lebih tegas dan jelas, sehingga jelas sasaran yang akan dicapai lebih optimal dan teratur;
3. Mendorong terciptanya efisiensi melalui koordinasi yang jelas antarprogram dan kegiatan.

Konsep *money follow program* menegaskan perlunya pendekatan penganggaran yang berdasarkan pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Aceh yang bertugas melaksanakan sebagian pencapaian **Kebijakan Pembangunan Aceh** Tahun 2024 yaitu **"MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK-HAK SIPIL, POLITIK, SOSIAL, EKONOMI MASYARAKAT DAN MENSUKSESKAN AGENDA POLITIK PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK"** dalam rangka mencapai sasaran **Kebijakan Pembangunan Aceh**, melalui Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, terdapat dua tujuan untuk mendukung Rencana Pembangunan Aceh (RPA), yaitu : 1) Penguatan sistem pengadaan elektronik melalui penyusunan rencana induk SPBE dan memperbanyak objek e-katalog lokal serta aplikasi yang terintegrasi, dan ; 2) Peningkatan kesejahteraan petani melalui

penyediaan irigasi tersier, penyuluhan SDM Petani dan pemanfaatan lahan pekarangan dan teknologi pertanian.

Rencana Kerja (RENJA) Akhir Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2024 disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Awal yang memuat "Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 (Renstra 2018-2022) serta Renstra SKPA Tahun 2023-2026, Analisis Kinerja Pelayanan SKPA, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA, Review Terhadap Rencana Kerja (RENJA) Awal RKPA".

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman.
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Penda).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
13. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
14. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 Tahun 2012 Tentang Kawasan Pertanian Tanaman Pangan.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 830 Tahun 2016 Tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional.
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
30. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.
31. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan

32. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
33. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
34. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
35. Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh; dan
36. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 520 Tahun 2017 Tentang Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 sebagai data awal dalam Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang merupakan Pedoman dan Acuan dalam pelaksanaan rencana program/kegiatan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam kurun waktu satu tahun yang akan datang, sehingga arah dan tujuan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dapat konsisten dan berkesinambungan. Dimana Rencana Kerja (RENJA) Awal Tahun 2024 ini telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam kurun waktu dimulai sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Maksud dan Tujuan dalam Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan Penelaahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
2. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2018-2022.
3. Menganalisis Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam rangka mendukung Rencana Kerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ingin dicapai.
4. Merumuskan isu-isu penting dalam rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
5. Melakukan Review Terhadap Rencana Akhir RKPA pada tahun yang akan datang.

Untuk mendukung Rencana Pembangunan Aceh melalui Dinas Teknis pada SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dalam rangka mendukung Kebijakan Pembangunan Aceh melalui SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19;
- b. Menciptakan *Good Government* dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan, efektivitas *pengawasan* kinerja untuk pelayanan publik.
- c. Mempercepat distribusi sarana produksi (Saprodi) dan hasil panen dan bertambahnya luas areal Penanaman Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- d. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas serta mutu hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pengembangan pemasaran hasil produk pertanian dan perkebunan unggulan daerah melalui penelitian-

- penelitian, Pameran Pembangunan Daerah dan Nasional dan Luar Negeri sekaligus sebagai ajang promosi hasil produk pertanian unggulan daerah.
- e. Meningkatkan penerapan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna dalam rangka budidaya tanaman padi, palawija, hortikultura dan perkebunan.
 - f. Peningkatan penumbuhan dan pengembangan kawasan serta peningkatan IP300, (sentra agribisnis) spesifik lokasi tanaman padi, palawija. Hortikultura dan Perkebunan.
 - g. Peningkatan sistem peramalan, pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman pertanian dan perkebunan.
 - h. Penguatan UPJA Provinsi dan Kabupaten dengan membentuk brigade tanam dan brigade panen.
 - i. Penguatan Peran dan Fungsi UPTD Lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
 - j. Penguatan Institusi Perbenihan Balai Benih Induk dan Balai Benih Utama.
 - k. Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Penyuluh dan Petani.

1.4. Sistematika Penulisan.

Berdasarkan pasal 78 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD pasal 78 menyatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RKPD mencakup penelaahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) SKPA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPA, proses penyusunan Renja SKPA, keterkaitan antara Renja SKPA dengan dokumen RKPA, Renstra SKPA, dengan Renja K/L dan Tindak Lanjutnya dengan Proses penyusunan RAPBA.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan SKPA, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPA.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPA.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPA serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Aceh tahun 2022 dan Mempedomani Renstra SKPA 2023-2026.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun 2022 Renstra Tahun 2018-2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 Renstra Tahun 2023-2026. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPA berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja/Renstra SKPA tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPA mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPA dan/atau realisasi APBA untuk SKPA yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPA;
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- Tabel yang harus disajikan adalah Tabel T-C. 29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Aceh.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPA, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPA serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPA yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPA perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPA yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPA yang disesuaikan menurut SKPA masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

Berisikan uraian mengenai :

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPA dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPA, diuraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPA Provinsi dengan

SKPK Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian Pertanian di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPA;
- Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals) / SDGs;
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPA; dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rencana Kerja (RENJA) Awal RKPA

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rencana Kerja (RENJA) RKPA dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rencana Kerja (RENJA) RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Kerja (RENJA) RKPA, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampiran tabel T-C.31.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN.

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPA.

3.3. Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi melalui Jabaran Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai :

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misalnya:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- Pengentasan kemiskinan;
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- Pengembangan daerah terisolir.

- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu;
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) Akhir RKPA, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPA.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Periode 2018 - 2022, dari lima tahun masa pelaksanaan program pembangunan sebagaimana telah dituangkan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Pada Tahun 2022 adalah awal dari pelaksanaan Rencana Startegis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta Realisasi Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan Pada Tahun 2022.

Realisasi Capaian Kinerja Program Rencana Kerja tersebut sebagaimana telah didokumentasikan kedalam RKA-APBA dan DPA APBA Tahun 2022. Dari program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 mengalami kenaikan besaran pagu dari Target Kinerja yang akan dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam RPJM Aceh, Renstra dan Renja Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Aceh Tahun 2022 sebesar **Rp. 314.507.337.825.-** sedangkan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan dalam DPA-SKPA Tahun 2022 sebesar Rp. 304.247.232.168.- (96,74%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 10.260.105.656.- (3,26%).

Dari jumlah alokasi pagu pada tahun 2022 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terdiri dari berbagai sumber dana yaitu DAU sebesar Rp. 51.403.389.932 gaji dan tunjangan, PAA sebesar Rp. 30.246.185.015 gaji dan tunjangan, SPAA sebesar Rp. 25.146.379.939, PPR sebesar Rp. 2.722.960.531, BLUD sebesar Rp. 700.000.000, DID sebesar Rp. 5.721.213.000, Otsus Aceh sebesar Rp. 77.249.259.633, SOTUS sebesar Rp. 112.037.113.826, SDBHCHT

sebesar Rp. 3.891.606.749, DBHCHT sebesar Rp. 1.946.956.200, HIBAH sebesar Rp. 3.442.273.000.

Realisasi pagu terhadap capaian program tahun 2022 tersebut adanya penurunan realisasi yang disebabkan adanya kegiatan yang dirasionalkan. Dari target dan realisasi capaian rencana kerja tahun 2022 terdapat beberapa perubahan besaran pagu dan rekening. Adapun penjelasan target dan realisasi capaian kinerja program sebagai berikut :

BELANJA TIDAK LANGSUNG.

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 644 orang yang terdiri dari Dinas, 4 UPTD dan 3 SMK-PP Aceh. Pagu Anggaran yang disediakan sesuai dengan Renstra untuk tahun 2022 sebesar **Rp. 72.781.329.585.-**, realisasi keuangan sebesar Rp. 71.383.748.883,- (98,08%). Terjadi silpa sebesar Rp. 1.397.580.702,- (0,44%)

BELANJA LANGSUNG

Alokasi dana untuk belanja langsung Tahun 2022 adalah **Rp. 241.726.008.240,-** realisasi keuangan Rp. 232.863.483.285,- atau sebesar 74,04% sisa dana Rp. 8.862.524.955,-. (2,82%). Sisa lebih pelaksanaan anggaran (SILPA) yang tidak dapat dilaksanakan antara lain disebabkan karena :

1. Keterbatasan melakukan kegiatan dilapangan akibat Pandemi Covid-19.
2. Sisa Tender.
3. Gagal Tender (pekerjaan tidak terealisasi).
4. Waktu pelaksanaan pekerjaan APBA Perubahan terbatas.
5. Efisiensi dari penetapan harga penawaran yang lebih rendah, pantas, dan wajar dan tidak mengurangi kualitas.
6. Efisiensi dari penyediaan jasa surat menyurat, perjalanan dinas, bahan bakar minyak/gas dan pelumas, pembayaran telepon, air, listrik, internet, cetak, penggandaan, honor-honor, penggantian suku cadang, pajak kendaraan

bermotor, bahan praktek/keterampilan, pakaian, kelengkapan kerja lapangan, peralatan/perlengkapan pakai habis, Pengadaan Alat Kantor lainnya dan alat bantu keamanan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, asuransi kesehatan, uang saku dan transport peserta pertemuan, jasa nara sumber, jasa pembaca doa/alquran, makanan dan minuman, transportasi, ATK, Pengadaan computer unit/jaringan, pengadaan bangunan gedung kantor, jasa service, pemeliharaan asset tetap dan asset lainnya, seminar kit, dan akomodasi pertemuan/workshop.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN.

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN (3).

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (3.27).

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.27.01).

a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2022 alokasi pagu sebesar Rp. 3.942.248.446,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 3.856.833.527,- (1,23%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 85.414.919 (0,03%).

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, merupakan pendukung dari Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 3.364.715.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 3.295.401.203 (1,05%) dan silpa sebesar Rp. 69.313.797 (0,02).

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, merupakan pendukung dari Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 577.533.446, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 561.432.324 (0,18) dan silpa sebesar Rp. 25.321.284 (0,01%).

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022 alokasi pagu sebesar Rp. 72.781.329.585.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 71.383.748.883,- (22,70%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 1.397.580.702 (0,44%).

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 72.781.329.585.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 71.383.748.883,- (22,70%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 1.397.580.702 (0,44%).

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 alokasi pagu sebesar Rp. 544.869.058.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 498.263.770,- (0,16%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 46.605.288 (0,01%).

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 190.319.058, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 180.880.000 (0,06%) dan silpa sebesar Rp. 9.439.058 (0,003%).

2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 190.319.058, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 154.839.770 (0,05%) dan silpa sebesar Rp. 35.160.230 (0,01%).

3. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Sub Kegiatan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 164.550.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 162.544.000 (0,05%) dan silpa sebesar Rp. 2.006.000 (0,001%).

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pada Tahun 2022 alokasi pagu sebesar Rp. 2.115.280.000- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.090.714.822,- (0,66%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 24.565.178 (0,01%).

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 150.000.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 147.545.862 (0,05%) dan silpa sebesar Rp. 2.454.138 (0,001).

2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 911.230.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 902.726.317 (0,29%) dan silpa sebesar Rp. 8.503.683 (0,003%).

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 209.050.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 205.274.000 (0,07%) dan silpa sebesar Rp. 3.776.000 (0,001%).

4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 45.000.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 37.110.000 (0,01%) dan silpa sebesar Rp. 7.890.000 (0,003%).

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 800.000.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 798.058.643 (0,25%) dan silpa sebesar Rp. 1.941.357 (0,001%).

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 alokasi pagu sebesar Rp. 9.065.474.064- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 8.752.765.220,- (2,78%%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 312.708.844 (0,10%%).

1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 7.461.523.823,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 7.184.412.347,- (2,28%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 277.111.476 (0,009%).

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 alokasi pagu sebesar Rp. 20.171.625.240.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 19.579.976.632,- (6,23%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 591.648.608.- (0,19%).

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 32.040.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 30.431.300 (0,01%) dan silpa sebesar Rp. 1.608.700 (0,001).

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 2.061.440.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.959.358.125 (0,62%) dan silpa sebesar Rp. 102.081.875 (0,03%).

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 762.535.240, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 721.604.050 (0,23%) dan silpa sebesar Rp. 40.931.190 (0,01%).

4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 17.315.610.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 16.868.583.157 (5,36%) dan silpa sebesar Rp. 447.026.843 (0,14%).

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022 alokasi pagu sebesar Rp. 6.206.369.537,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 5.879.902.157,- (1,87%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 326.467.380,- (0,10%).

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 4.029.369.537, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 3.712.301.442 (1,18%) dan silpa sebesar Rp. 317.068.095 (0,10%).

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, merupakan pendukung dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi pagu sebesar Rp. 2.177.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.167.600.715 (0,69%) dan silpa sebesar Rp. 9.399.285 (0,003%).

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (3.27.02).

- a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Kegiatan Pengawasan Peredaran Saran Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022 alokasi pagu

sebesar Rp. 40.321.000.788,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 39.684.613.261,- (12,06%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 308.199.839 (0,10%).

1. Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian.

Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian alokasi pagu sebesar Rp. 38.227.308.496, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 37.919.108.657 (12,06%) dan silpa sebesar Rp. 308.199.839 (0,010%).

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian.

Sub Kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian alokasi pagu sebesar Rp. 2.093.692.292,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.765.504.604 (0,56%) dan silpa sebesar Rp. 328.187.688 (0,010%).

- b. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022 alokasi pagu sebesar Rp. 142.284.096.584,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 136.366.825.808,- (43,36%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 5.917.270.776 (1,88%).

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih.

Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan

Peredaran Benih Tanaman alokasi pagu sebesar Rp. 826.190.673, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 816.477.600 (0,26%) dan silpa sebesar Rp. 9.713.073 (0,003%).

2. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura.

Sub Kegiatan Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman alokasi pagu sebesar Rp. 57.926.112.808, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 53.093.592.631 (16,88%) dan silpa sebesar Rp. 4.832.520.177 (1,54%).

3. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan.

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman alokasi pagu sebesar Rp. 14.344.689.816, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 13.910.093.185 (4,42%) dan silpa sebesar Rp. 434.596.631 (0,14%).

4. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan.

Sub Kegiatan Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman alokasi pagu sebesar Rp. 69.187.103.287, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 68.546.662.392 (21,79%) dan silpa sebesar Rp. 640.440.895 (0,20%).

- c. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi.

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Tahun 2022 alokasi pagu sebesar Rp. 635.689.181.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 631.764.616,- (0,20%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 3.924.565 (0,001%).

1. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme.

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme., merupakan pendukung dari Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi alokasi pagu sebesar Rp. 635.689.181.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 631.764.616,- (0,20%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 3.924.565 (0,001%).

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (3.27.03).

- a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian.

Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Tahun 2022 alokasi pagu sebesar Rp. 460.757.000.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 454.595.830,- (0,14%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 6.161.170 (0,002%).

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani, merupakan pendukung dari Kegiatan Penataan

Prasarana Pertanian alokasi pagu sebesar Rp. 121.937.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 117.940.830 (0,04%) dan silpa sebesar Rp. 3.996.170 (0,001%).

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani, merupakan pendukung dari Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian alokasi pagu sebesar Rp. 149.600.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 149.128.100 (0,05%) dan silpa sebesar Rp. 471.900 (0,0002%).

3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, merupakan pendukung dari Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian alokasi pagu sebesar Rp. 189.220.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 187.526.900 (0,06%) dan silpa sebesar Rp. 1.693.100 (0,001%).

IV. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (3.27.05).

- a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Tahun 2022 alokasi pagu sebesar Rp. 535.369.454,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 520.739.464,- (0,17%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 14.629.990 (0,005%).

1. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Sub Kegiatan Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi alokasi pagu sebesar Rp.535.369.454,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp.520.739.464,- (0,17%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 14.629.990 (0,005%).

V. Program Perizinan Usaha Pertanian (3.27.06).

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Tahun 2022 alokasi pagu sebesar Rp.2.474.053.630,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp.2.445.494.483,- (0,78%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 28.559.147 (0,05%).

1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota alokasi pagu sebesar Rp. 2.474.053.630,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.445.494.483,- (0,78%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 28.559.147 (0,05%).

VI. Program Penyuluhan Pertanian (3.27.07).

a. Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Tahun 2022 alokasi pagu sebesar Rp. 449.160.851.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 446.547.642,- (0,14%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 2.613.209 (0,001%).

1. Sub Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta.

Sub Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian alokasi pagu sebesar Rp. 449.160.851.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 446.547.642,- (0,14%). terjadinya silpa sebesar Rp. 2.613.209 (0,001%).

b. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Tahun 2021 alokasi pagu sebesar Rp. 820.000.000.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 794.298.415,- (0,25%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 25.701.585 (0,01%).

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani., merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian alokasi pagu sebesar Rp. 820.000.000.- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 794.298.415,- (0,25%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 25.701.585 (0,01%).

- c. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Tahun 2022 alokasi pagu sebesar Rp. 11.000.014.407,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 10.860.147.639,- (3,45%). Terjadinya silpa sebesar Rp. 139.866.768 (0,04%).

1. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani.

Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan alokasi pagu sebesar Rp. 992.631.509, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 972.118.249 (0,31%) dan silpa sebesar Rp. 20.513.260 (0,01%).

2. Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani.

Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan alokasi pagu sebesar Rp. 3.742.273.000, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 3.645.833.380 (1,16%) dan silpa sebesar Rp. 96.439.620 (0,03%).

3. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.

- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan alokasi pagu sebesar Rp. 6.265.109.898, dengan capaian

realisasi keuangan sebesar Rp. 6.242.196.010 (1,98%) dan silpa sebesar Rp. 22.913.888 (0,01%).

Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 Capaian Renstra Tahun 2018-2022, serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024 Renstra Tahun 2023-2026, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down*, *bottom-up* dan *money follow program* dilakukan belum maksimal.
2. Belum optimalnya anggaran pembiayaan kegiatan;
3. Belum optimalnya koordinasi antar Kabupaten/Kota;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang output yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan ;
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPA maupun dalam RPJMA dalam merencanakan kegiatan.
6. Dalam melaksanakan kegiatan setiap penanggung jawab kegiatan untuk tidak bertumpu pada pencapaian realisasi fisik dan keuangan semata, akan tetapi perlu evaluasi lebih mendalam terhadap pencapaian realisasi manfaat dari pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Perlu merencanakan kegiatan kedepannya untuk dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

- b. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada faktor-faktor penyebab tersebut di atas maka Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melakukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sebagai berikut :

- Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggungjawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.

- Menganalisa data dan permasalahan yang ada

Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, pada kegiatan peningkatan prasarana pertanian dan perkebunan dirasakan masih terdapat kendala dalam hal tahapan prosedur administrasi perencanaan dan penyiapan lahan, dan analisa dampak lingkungan maupun kajian terhadap peningkatan prasarana pertanian dan perkebunan belum dilaksanakan dalam hal mitigasi resiko

bencana maupun dampak lain yang ditimbulkan yang dapat merugikan masyarakat.

- Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

Aspek kerugian negara diupayakan risikonya dapat diminimalisir. kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- Mengusulkan anggaran lanjutan untuk kegiatan yang diperkirakan tidak akan selesai pada tahun bersangkutan.

Apabila terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan pada tahun bersangkutan karena suatu hal maka kegiatan diusulkan anggaran lanjutan.

Kegiatan yang akan diusulkan harus dikaji dulu permasalahannya apakah karena gagal lelang, pelaksanaan terlambat, atau faktor lain yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

RANWAL RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2024

Tabel T-C.29

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S/D TAHUN 2022

Nama SKPA : Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA TAHUN 2023-2026)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPA TAHUN 2024)	PERGARAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (2023)	
				TARGET RENJA SKPA TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPA TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)	(8)	(9=4+6+8)	(10=9/3)
3.27.01.	PROGRAM PENULIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
3.27.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Laporan Capaian kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)							
3.27.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen				4 Dok.	4 Dok.	100
3.27.01.1.01.04.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tertelaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Data Statistik dan Informasi Pertanian	16 Dokumen	20 Dok.	20 Dok.	100	4 Dok.	4 Dok.	100
3.27.01.1.01.06.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	8 Dokumen	23 Kab./Kota	23 Kab./Kota	100	2 Dok.	2 Dok.	100
3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan							
3.27.01.1.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	645 Orang	12 Bln	12 Bln	100	645 Org	12 Bln	100
3.27.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Perentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi							
3.27.01.1.05.02.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1.300 Stal	650 Stal.	650 Stal.		650 Stal.		
3.27.01.1.05.09.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tertelaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50 Org	20 Org.	20 Org.	100	15 Org.	15 Org.	100
3.27.01.1.05.10.	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tertelaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	210 Org	12 Bln	12 Bln	100	60 Org	60 Org	100
3.27.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur							
3.27.01.1.06.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80 Paket	12 Bln	12 Bln	100	20 Pkt	20 Pkt	100
3.27.01.1.06.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	44 Paket	12 Bln	12 Bln	100	11 Pkt	11 Pkt	100
3.27.01.1.06.05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	44 Paket	12 Bln	12 Bln	100	11 Pkt	11 Pkt	100
3.27.01.1.06.06.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24 Dokumen	12 Bln	12 Bln	100	6 Dok	6 Dok	100
3.27.01.1.06.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	12 Bln	12 Bln	100	1 Lap.	1 Lap.	100
3.27.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur							
3.27.01.1.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit				2 Unit		
3.27.01.1.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	10 Unit	10 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100
3.27.01.1.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260 Unit	11 Unit	11 Unit	100	65 Unit	65 Unit	100
3.27.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah							
3.27.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertelaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	12 Bln	12 Bln	100	1 Lap.	1 Lap.	100
3.27.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	4 Laporan	12 Bln	12 Bln	100	1 Lap.	1 Lap.	100
3.27.01.1.08.03.	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	Tertelaksananya Perawatan Perlangkapan dan Perawatan Kantor	4 Laporan	12 Bln	12 Bln	100	1 Lap.	1 Lap.	100
3.27.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	12 Bln	12 Bln	100	1 Lap.	1 Lap.	100
3.27.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur							
3.27.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	437 Unit	12 Bln	12 Bln	100	437 unit	437 unit	100
3.27.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertelaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20 Unit	12 Bln	12 Bln	100	20 unit	12 Bln	100
3.27.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								
3.27.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100

RANWAL RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=(8*3))	(8)	(9=(4+8+8))	(10=(9/3))	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
3.27.02.1.01.	Kegiatan Pengawasan Penedaran Sarana Pertanian	Meningkatnya indeks yang diterima petani (It) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan								
3.27.02.1.01.01.	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Abiotan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terasainya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Abiotan, dan Sarana Pendukung Pertanian.	4	Laponan	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100	1 Lap.	1 Lap.	100
3.27.02.1.01.02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penedaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penedaran Sarana Pertanian.	4	Dokumen	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100	1 Lap.	1 Lap.	100
3.27.02.1.02.	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih/Tanaman	Meningkatnya indeks yang diterima petani (It) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan								
3.27.02.1.02.01.	Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terkalanya Penerbitan Sertifikat Benih.	2.190	Sertifikat	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	100	545 Srtifikat	545 Srtifikat	100
3.27.02.1.02.02.	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih/Sabit Hortikultura	Terasainya Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih/Sabit Hortikultura	4	Laponan	15 Komoditi	15 Komoditi	100	1 Lap.	1 Lap.	100
3.27.02.1.02.03.	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih/Sabit Tanaman Pangan	Terasainya Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih/Sabit Tanaman Pangan	4	Dokumen	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	100	1 Dok.	1 Dok.	100
3.27.02.1.02.04.	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih/Sabit Perkebunan	Terasainya Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih/Sabit Perkebunan	4	Laponan	20 Komoditi	20 Komoditi	100	1 Lap.	1 Lap.	100
3.27.02.1.03.	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kawasan Provisial	Meningkatnya indeks yang diterima petani (It) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan								
3.27.02.1.03.04.	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme.	4	Laponan	11 Komoditi	11 Komoditi	100	1 Lap.	1 Lap.	100
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
3.27.03.01.	Penataan Prasarana Pertanian	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas								
3.27.03.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	4	Dokumen	10 Kag	10 Kag	100	1 Dok.	1 Dok.	100
3.27.03.01.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani.	4	Dokumen	10 Kag	10 Kag	100	1 Dok.	1 Dok.	100
3.27.03.01.09.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.	4	Laponan	15 Kag	15 Kag	100	1 Lap.	1 Lap.	100
3.27.03.01.10.	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Tersehatkan, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	8	Unit	3 UPTD			1 Unit	1 Unit	100
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									
3.27.05.1.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provisial	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas								
3.27.05.1.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25.994	Ha	20 Kag	4 Kag	100	25.998 Ha	25.726 Ha	100
3.27.06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									
3.27.06.1.01.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbina dan terasainya usaha perkebunan besar								
3.27.06.1.01.03.	Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Izin Usaha Pertanian	Terbina dan Terasainya Penanaman Izin Usaha Pertanian	4	Laponan	20 Kab./Kota	20 Kab./Kota	100	1 Lap.	1 Lap.	100
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									
3.27.07.1.01.	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya tenaga penyuluh yang inovatif dan informatif								
3.27.07.1.01.02.	Sub Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	330	Orng	7 Kag	7 Kag	100	80 Org	80 Org	100
3.27.07.1.02.	Kegiatan Pengembangan Penetapan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya hasil penyuluhan penentuan praktik pertanian								
3.27.07.1.02.02.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.	50	Kelompok	50 Kelas	50 Kelas	100	12 Klp	10 Klp	100
3.27.07.1.03.	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Meningkatnya Kelembagaan dan SDM Petani								
3.27.07.1.03.01.	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Terbentuk dan Beroperasinya Kelembagaan Korporasi Petani	14	Unit	12 Kag	12 Kag	100	4 Unit	4 Unit	100
3.27.07.1.03.02.	Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Terlaksananya Pelatihan Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani	4	Laponan	7 Kag	7 Kag	100	1 Lap.	1 Lap.	100
3.27.07.1.03.04.	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani	3	Unit	3 SWK PP	3 SWK PP	100	3 Unit	3 Unit	100

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh. Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dan Perkebunan serta Penyuluhan Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas ini diselenggarakan oleh seluruh komponen dalam dinas mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bagian sampai Kepala Seksi beserta stafnya serta Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- c. Penyusunan program penyuluhan pengembangan sumber daya tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- d. Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan,

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2023

- hortikultura dan perkebunan;
- i. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - j. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - k. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - l. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - m. Pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - n. Pembinaan UPTD; dan
 - o. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pertanian dan perkebunan.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2018–2022. Analisis Kinerja Pelayanan dapat digambarkan pada tabel T-C.30 sebagai berikut :

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2024

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK PP 6 2008	Satuan	RENTRA TAHUN 2028-2022										RENTRA TAHUN 2023-2026		Hasil Analisis
					Target Kinerja					Capaian Realisasi					Proyeksi		
					2018 (n-1)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+1)	2022 (n+1)	2018 (n-2)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+1)	2022 (*) (n+1)	2023 (n)	2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pertanian																
1	Kontribusi Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB			%	6,26	6,18	6,29	6,40	6,40	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,29	6,40	
2	Kontribusi Sektor Tanaman Hortikultura Terhadap PDRB			%	4,68	4,70	4,85	5,00	5,00	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,85	5,00	
3	Kontribusi Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB			%	7,09	7,28	7,32	7,36	7,36	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59	7,32	7,36	
4	Kontribusi Produksi Tanaman Pangan																
	-Padi			Ton	2.539.311	2.625.047	2.713.675	2.805.293	2.900.000	2.556.857	1.714.419	1.757.313	1.634.640	1.533.138	1.712.000	1.729.000	
	-Jagung			Ton	363.033	383.059	404.188	426.400	450.000	362.267	385.310	485.117	343.865	200.250	327.000	333.000	
	-Kedele			Ton	40.953	41.930	42.929	43.952	44.975	14.005	584,1	774	691	1.108	610	611	
	-Kacang Tanah			Ton	2.709	2.844	2.986	3.136	3.136	2.709	2.709	2.709	3.067	2.709	3.000	3.000	
	-Ubi Kayu			Ton	31.169	33.085	35.118	37.277	37.277	31.169	31.169	31.169	29.472	31.169	44.522	44.611	
5	Kontribusi Produktivitas Tanaman Pangan Per Hektar																
	-Padi			Ku/Ha	54,50	55,50	56,70	57,80	57,80	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	5,65	5,65	
	-Jagung			Ku/Ha	47,10	48,04	49,00	49,98	49,98	47,10	47,10	47,10	47,10	47,10	5,66	5,66	
	-Kedele			Ku/Ha	16,12	16,33	26,74	16,76	16,76	16,12	16,12	16,12	16,12	16,12	1,50	1,50	
	-Kacang Tanah			Ku/Ha	14,85	15,59	16,37	17,19	17,19	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	1,34	1,35	
	-Ubi Kayu			Ku/Ha	148,60	153,06	157,65	162,38	162,38	148,60	148,60	148,60	148,60	148,60	37,41	37,41	
6	Kontribusi Produksi Hortikultura																
	-Bawang Merah			Ton	7.414	7.785	8.172	8.583	9.012	6.817	8.839	11.246	36.500	11.246	8.920	9.366	
	-Cabe Merah			Ton	50.108	52.613	55.244	58.006	60.906	68.151	63.595	73.443	119.613	18.138	111.899	112.458	
	-Kentang			Ton	72.955	76.603	80.433	84.455	84.455	72.955	72.955	72.955	85.494	72.955	14.644	14.688	
	-Jeruk			Ton	7.983	8.382	8.801	9.241	9.241	7.983	7.983	7.983	7.983	7.983			
	-Pisang			Ton	83.958	88.156	92.564	97.192	97.192	83.958	83.958	83.958	83.958	83.958			
7	Kontribusi Produktivitas Hortikultura																
	-Bawang Merah			Ton/Ha	9,09	9,10	9,10	9,10	9,10	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	8,09	8,29	
	-Cabe Merah			Ton/Ha	10,65	10,65	10,66	10,67	10,67	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65	13,51	13,51	
	-Kentang			Ton/Ha	23,97	23,98	24,00	24,01	24,01	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	11,42	11,42	
	-Jeruk			Ton/Ha	31,39	31,42	31,42	31,44	31,44	31,39	31,39	31,39	31,39	31,39			
	-Pisang			Ton/Ha	68,65	68,69	68,72	68,76	68,76	68,65	68,65	68,65	68,65	68,65			

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2024

8	Kontribusi Produksi Perkebunan															
	- Kelapa Sawit Rakyat		Ton	515.416	554.036	577.828	635.346	693.626	440.086	441.603	444.436	456.426	461.162	458.200	459.102	
	- Kelapa		Ton	62.700	63.500	64.000	64.500	65.000	63.500	63.772	63.769	66.434	66.514	64.686	64.815	
	- Kopi		Ton	65.120	65.200	65.300	65.400	65.500	70.774	72.652	73.419	74.328	75.288	73.899	74.046	
	- Kakao		Ton	43.500	45.000	46.000	46.200	46.800	39.295	41.093	41.648	40.724	38.323	42.500	44.120	
	- Karet		Ton	71.900	72.500	73.200	73.500	73.500	65.652	65.652	65.652	63.736	65.652			
	- Pala		Ton	7.000	7.500	8.230	8.500	8.500	6.586	6.586	6.586	6.688	6.586	6.742	6.756	
	- Lada		Ton	350	355	358	358	358	358	358	358	268	358	195	195	
	- Nilam		Ton	400	450	560	700	700	225	225	225	159	225	192	193	
	- Cengkeh		Ton	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000	5.513	5.513	5.513	5.727	5.513	5.434	5.445	
9	Kontribusi Produktivitas Perkebunan															
	- Kelapa Sawit Rakyat		Ton/Ha	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2.741	2.745	2.745	2,79	2,79	
	- Kelapa		Ton/Ha	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	852	859	859	0,86	0,86	
	- Kopi		Ton/Ha	0,73	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	785	787	787	0,80	0,81	
	- Kakao		Ton/Ha	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	720	719	719	0,73	0,75	
	- Karet		Ton/Ha	0,95	0,95	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	859	871	871			
	- Pala		Ton/Ha	0,70	0,72	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	662	656	656	-	0,60	
	- Lada		Ton/Ha	0,76	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	518	477	477	0,44	0,44	
	- Nilam		Ton/Ha	0,36	1,30	1,45	1,50	1,50	1,50	1,50	174	182	182	0,19	0,19	
	- Cengkeh		Ton/Ha	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	599	599	599	0,60	0,60	
10	Cakupan Bina Kelompok Tani		Klp	1.294	1.361	1.450	1.539	1.539	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.450	1.539	
11	Rasio Penyuluh Terakreditasi		%	4,09	4,41	4,72	5,03	5,03	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,72	5,03	
12	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan		%	89,22	93,66	95,30	96,94	96,94	91,53	91,53	91,53	91,53	91,53	95,30	96,94	
13	Nilai Tukar Petani Hortikultura		%	104,72	109,64	108,22	109,64	109,64	102,30	102,30	102,30	102,30	102,30	108,22	109,64	
14	Nilai Tukar Petani Perkebunan		%	95,58	98,53	107,21	107,21	107,21	87,27	87,27	87,27	87,27	87,27	107,21	107,21	

Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tahun 2022 mengalami penurunan terlihat dari jumlah produksi dan produktivitas tanaman padi dan palawija, tercapainya produksi dan produktivitas yang diperoleh sangat terkait dengan penggunaan benih unggul bermutu dan persediaan air cukup, pengendalian hama dan penyakit serta penyluhan pertanian yang efektif sebagai faktor sangat mempengaruhi dalam peningkatan produksi dan produktivitas dalam pengukuran keberhasilan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa mendatang adalah dengan;

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait untuk memperlancar proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan,
- b. Penetapan CP/CL di kabupaten diharapkan tepat waktu dan secepatnya sebelum jadwal pelelangan ditetapkan, dan
- c. Program/kegiatan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat membuat indikator, sasaran dan target yang direncanakan sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2018-2022 dan Renja Tahun 2024 Renstra Tahun 2023-2026 agar dapat diukur dan diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya.

Dari uraian di atas mengenai kinerja pelayanan SKPA tentang Produksi dan Produktivitas hasil Pertanian dan Perkebunan di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan pembiayaan yang cukup untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPA.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata pada

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2024

penyediaan bahan pangan, sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui penyediaan bahan pangan bagi masyarakat, penyediaan lapangan kerja masyarakat dan kontribusi dalam produk domestik regional bruto (PDRB) daerah.

Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Aceh tahun 2023 - 2026 menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas melalui prioritas program "ketahanan pangan dan nilai tambah hasil pertanian" dan merupakan leading/penggerak untuk sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, pengolahan hasil industri basisnya dan penggeraknya ada disektor pertanian, khususnya sub-sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.

Kendala dan permasalahan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan saat ini seperti, optimalisasi sumber daya lahan pertanian masih rendah, alih fungsi lahan produktif (lahan sawah), akses petani terhadap lahan dan permodalan, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani serta kinerja penyuluhan pertanian, jaminan pemasaran dan pengolahan hasil serta upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan perkebunan yang masih lemah, hal ini mengakibatkan laju pembangunan pertanian khususnya sektor tanaman pangan belum berjalan sesuai harapan.

Pembangunan sektor pertanian dan perkebunan membutuhkan sinergitas pihak terkait, kesamaan persepsi dan sinkronisasi yang kuat, tanpa ini rencana kerja yang sudah disusun dan kita tetapkan pasti akan berjalan tidak sesuai seperti yang kita harapkan, untuk itu pihak kami mengharapkan semua pihak terkait agar dapat melakukan persiapan-persiapan, sinergitas antara pihak terkait pelaksana koordinasi yang inten di daerah masing-masing karena pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pada saat ini ada disektor pertanian dan perkebunan.

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2024

Pemerintah pusat melalui kementerian pertanian memprioritaskan Aceh di sektor pertanian dan perkebunan khususnya sektor tanaman pangan, mengingat kontribusi yang besar pada sumber mata pencarian, penyerapan tenaga kerja dan PDRB Aceh dari sektor ini, dan target yang ingin dicapai pada akhir RPJM Aceh Renstra Tahun 2023-2026 kontribusi Aceh untuk penyediaan pangan nasional menjadi 5 - 10 %.

Semua pihak terkait dalam pembangunan pertanian tanaman pangan seperti dinas pengairan, dinas pekerjaan umum, dinas perdagangan, dinas perindustrian, badan urusan logistik, BPS, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani dan instansi lainnya, untuk dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi agar pembangunan sektor pertanian yang menjadi andalan daerah bisa berjalan sebagaimana yang telah kita susun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2023 – 2026 dan Rencana Kerja (RENJA) Awal Tahun 2024.

Kebijakan dalam rangka mendukung Prioritas dan sasaran program adalah sebagai berikut :

1. Optimasi Lahan Pertanian dan Perkebunan.

Kegiatan Optimasi Tahan tersebut mencakup kegiatan - kegiatan Pemanfaatan Lahan Tidur (sleeping land), Peningkatan Indeks Tanam / Indeks Panen, Gerakan Percepatan Tanam Padi (tepat waktu) dan Pengaturan Pola Tanam Spesifik Lokasi serta pemanfaatan lahan-lahan terlantar.

2. Gerakan Peningkatan Mutu Intensifikasi.

Gerakan peningkatan mutu intensifikasi mencakup Kebijakan subsidi benih padi, jagung & kedelai, Pengembangan model SLPTT dan SRI, Pengembangan Model Foods Estate dan Penyediaan Armada Alsintan.

3. Revitalisasi Institusi Perbenihan.

Revitalisasi Institusi Perbenihan mencakup kegiatan Revitalisasi Balai Benih Induk, Revitalisasi Balai Benih Utama dan Revitalisasi Penangkar Benih serta Penumbuhan dan Pengembangan Kebun-kebun Perbibitan Perkebunan.

4. Penguatan Peran UPJA Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penguatan peran UPJA tersebut mencakup Pembentukan Brigade Tanam & Brigade Panen serta pembangunan Workshop Provinsi & Kabupaten Melalui kerjasama dengan produsen Alat & Mesin Pertanian.

5. Penguatan Peran dan Fungsi UPTD.

Penguatan Peran dan Fungsi UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan & Hortikultura dan Perkebunan, Balai Pengawasan dan Sertifikasih Benih, Balai Benih Tanaman Pangan, Balai Benih Tanaman Hortikultura, Mekanisasi Pertanian.

6. Koordinasi Penguatan Peran & Fungsi Penyuluhan Pertanian.

Koordinasi penguatan peran dan fungsi penyuluhan pertanian mencakup antara lain Koordinasi Pembinaan Fungsi & Peran Kelompok Tani/Kelembagaan Petani, Koordinasi Penguatan Peran Penyuluhan Pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian.

7. Peningkatan Nilai Tambah & Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan

Peningkatan Nilai Tambah dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan melalui kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen serta Aktif Membantu Kestabilan Harga Produk Pertanian/Perkebunan. Disamping itu upaya-upaya peningkatan mutu Hasil serta pengamanan mutu produk perlu mendapat

perhatian khusus agar tidak terjadi pencemaran mutu produk yang berdampak pada penurunan nilai jual produk.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Renja RKPA Tahun 2024.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2024 (Renstra Tahun 2023-2026) Pagu Indikatif sebesar **Rp. 134.353.000.000,-** dan berdasarkan Hasil Analisis Kebutuhan Anggaran dalam rangka peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan membutuhkan Anggaran maka Rancangan Akhir sebesar **Rp.145.290.674.432.-** sebagaimana Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Akhir RKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2024, dengan 6 Program, 16 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan, tersebar pada kegiatan Bidang Teknis dan non teknis Sekretariat, 5 Bidang Teknis, 4 UPTD dan 3 SMKPP.

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH TAHUN 2024

Tabel T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPA TAHUN 2024

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD					Catatan	Sumber Dana	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					135.553.000.000	3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					145.290.674.432	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					106.506.000.000	3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					88.971.811.304	
3 27 01 1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.908.000.000	3 27 01 1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.545.600.000	
3 27 01 1.01.01	01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.200.000.000	3 27 01 1.01.01	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	900.800.000	PAD
3 27 01 1.01.04	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Banda Aceh/ Nasional	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1.200.000.000	3 27 01 1.01.04	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Banda Aceh	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	321.200.000	PAD
3 27 01 1.01.06	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banda Aceh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	500.000.000	3 27 01 1.01.06	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banda Aceh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	323.600.000	PAD
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					81.917.000.000	3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					73.968.501.994	
3 27 01 1.02.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	645 Orang	81.917.000.000	3 27 01 1.02.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	645 Orang	73.968.501.994	PAA/DAU
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					738.000.000	3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					40.000.000	
3 27 01 1.05.02	02	Penataan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banda Aceh	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	650 Pkt	488.000.000	3 27 01 1.05.02	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banda Aceh/ Nasional	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		0	0
3 27 01 1.05.09	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banda Aceh/ Nasional	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Org	150.000.000	3 27 01 1.05.09	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banda Aceh/ Nasional	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Org	25.000.000	SPAA
3 27 01 1.05.10	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Org	100.000.000	3 27 01 1.05.10	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Org	15.000.000	SPAA
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.065.000.000	3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.598.351.015	
3 27 01 1.06.01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	150.000.000	3 27 01 1.06.01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	100.000.000	OTSUS
3 27 01 1.06.04	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	750.000.000	3 27 01 1.06.04	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	853.351.015	DAU
3 27 01 1.06.05	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banda Aceh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	220.000.000	3 27 01 1.06.05	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banda Aceh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	200.000.000	OTSUS
3 27 01 1.06.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	145.000.000	3 27 01 1.06.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	20.000.000	SPAA
3 27 01 1.06.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh/ Nasional	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	800.000.000	3 27 01 1.06.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	425.000.000	DAU
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.708.000.000	3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					282.750.000	
3 27 01 1.07.02	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.200.000.000	3 27 01 1.07.02	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	
3 27 01 1.07.09	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Banda Aceh	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.000.000.000	3 27 01 1.07.09	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Banda Aceh	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	232.750.000	OTSUS
3 27 01 1.07.10	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	65 Unit	500.000.000	3 27 01 1.07.10	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	DAU

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2024

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					KODE	RANCANGAN AKHIR RKPD					Catatan	Sumber Dana
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.590.000.000	3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.186.608.295		PAD
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.300.000.000	3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.100.000.000		OTSUS
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000.000	3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	550.000.000		PAD-DAU
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.750.000.000	3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.515.013.159		OTSUS
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	437 Unit	5.556.000.000	3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	437 Unit	2.350.000.000		OTSUS
3 27 01 1.09 02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	1.356.000.000	3 27 01 1.09 02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	700.000.000		OTSUS
3 27 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Aceh Besar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit Layanan	1.000.000.000	3 27 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Aceh Besar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit Layanan	400.000.000		BLUD
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				17.164.000.000	3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				27.834.177.195		
3 27 02 1.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kab./Kota	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	2.660.000.000	3 27 02 1.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kab./Kota	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	9.462.083.280		OTSUS-DAU
3 27 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kab./Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	12 Dokumen	2.200.000.000	3 27 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kab./Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1.205.240.000		OTSUS-DAU
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Kab./Kota	Jumlah Sertifikat Benih	6 Sertifikat	1.000.000.000	3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Kab./Kota	Jumlah Sertifikat Benih	545 Sertifikat	16.692.373.915		DAU-OTSUS DAK
3 27 02 1.02 01	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kab./Kota	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	2.568.000.000								
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kab./Kota	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	4.770.000.000								
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Kab./Kota	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan	5.166.000.000								
3 27 02 1.02 05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Kab./Kota	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat	1 Laporan	7.167.836.715								DBHCHT/ SDBHCHT/ OACEH/ SOTSUS
3 27 02 1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Pro	Kab./Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	1.000.000.000	3 27 02 1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewangan	Kab./Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	1.679.720.000		OTSUS-DAU

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2024

KODE	RANCANGAN AWAL RKP					KODE	RANCANGAN AKHIR RKP					Catatan	Sumber Dana	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)			
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					793.000.000	3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					8.906.327.808	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian					793.000.000	3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian					8.906.327.808	
3 27 03 1.01 01						3 27 03 1.01 01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kab./Kota	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	3.000.800.000		OTSUS-DAU
3 27 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	1 Dokumen	173.000.000	3 27 03 1.01 03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	1 Dokumen	50.000.000		DAU
3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	1 Dokumen	230.000.000	3 27 03 1.01 04	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	1 Dokumen	196.044.962		DAU
3 27 03 1.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab./Kota	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Optimasi Lahan dan Perluasan Areal Pertanian	1 Laporan	290.000.000	3 27 03 1.01 09	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab./Kota	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Optimasi Lahan dan Perluasan Areal Pertanian	1 Laporan	150.000.000		OTSUS
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kab./Kota	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 Unit	100.000.000	3 27 03 1.01 09	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab./Kota	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	0	0		0
3 27 03 1.01 13						3 27 03 1.01 13	13	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Kab./Kota	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	1 Dokumen	5.509.482.546		OTSUS-DAU
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					650.000.000	3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					9.535.339.800	
3 27 05 01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					650.000.000	3 27 05 01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					9.535.339.800	
3 27 05 01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab./Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	25.756 Ha	650.000.000	3 27 05 01 01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab./Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	25.855 Ha	9.535.339.800		OTSUS-DAK
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					1.000.000.000	3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					847.600.000	
3 27 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.000.000.000	3 27 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					847.600.000	
3 27 06 1.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab./Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	1.000.000.000	3 27 06 1.01 03	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab./Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	847.600.000		OTSUS
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					9.380.000.000	3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					9.195.418.625	
3 27 07 1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					540.000.000	3 27 07 1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					342.600.000	
3 27 07 1.01 02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Kab./Kota	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	80 Orang	540.000.000	3 27 07 1.01 04	04	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian.	Kab./Kota	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi.	80 Orang	342.600.000		OTSUS
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					660.000.000	3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					8.184.978.625	
3 27 07 1.02 01						3 27 07 1.02 01	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.	Kab./Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 Unit	7.863.778.625		OTSUS
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kab./Kota	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	12 Kelompok	660.000.000	3 27 07 1.02 02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kab./Kota	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	12 Kelompok	321.200.000		OTSUS
3 27 07 1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					8.180.000.000	3 27 07 1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					667.840.000	
3 27 07 1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kooprosasi	Kab./Kota	Jumlah Kooprosasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	4 Unit	480.000.000									
3 27 07 1.03 02	Pendampingan Manajemen Kooprosasi Petani	Kab./Kota	Jumlah Pendampingan Manajemen Kooprosasi Petani	1 Laporan	200.000.000									
3 27 07 1.03 04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kab./Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 Unit	7.500.000.000									
3 27 07 1.03 06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Kab./Kota				3 27 07 1.03 06	06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Kab./Kota		0	667.840.000		SOTSUS

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan.

Penelaahan usulan program dan kegiatan Bersama masyarakat/pemangku kepentingan yang diperoleh dari pokok-pokok pikiran DPRA serta Hasil Desk Rakortekrenbang dengan Kabupaten/Kota bersama Bappeda Provinsi Aceh serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, adalah sebagai berikut (Terlampir T-32). Usulan Program/Kegiatan dengan target yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2024

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
1.01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	
1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Banda Aceh/ Nasional	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	
1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banda Aceh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	
1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	645 Orang	
1.05.	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				
1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banda Aceh/ Nasional	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	15 Org	
1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Org	
1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	20 Paket	
1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	
1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banda Aceh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	
1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	6 Dokumen	
1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh/ Nasional	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Banda Aceh	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	
1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan	
1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	437 Unit	
1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	
1.10.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Aceh Besar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Layanan	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2024

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					
1.01	01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kab./Kota	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	
1.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kab./Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	
1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					
1.02	01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Kab./Kota	Jumlah Sertifikat Benih	545 Sertifikat	
1.02	05 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Kab./Kota	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6	1 Laporan	
1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi					
1.03	04 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kab./Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	
03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
1.01 Penataan Prasarana Pertanian					
1.01	01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kab./Kota	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	
1.01	03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	1 Dokumen	
1.01	04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kab./Kota	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	1 Dokumen	
1.01	09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab./Kota	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Optimalisasi Lahan dan Perluasan	1 Laporan	
1.01	13 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Kab./Kota	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	1 Dokumen	
05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					
01.	01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab./Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	25.855 Ha	
06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1.01	03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab./Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	
07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					
1.01	04 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian.	Kab./Kota	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan	80 Orang	
1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					
1.02	01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.	Kab./Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 Unit	
1.02	02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kab./Kota	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	12 Kelompok	
1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan					
1.03	06 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Kab./Kota	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	4 Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT ACEH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 - 2024, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan daya saing. Pengembangan sistem pola integrasi diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Peningkatan produksi pangan haruslah mampu meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memerhatikan kualitas pangan yang bergizi, beragam dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan dan bercita rasa bagi semua. Kebijakan pangan juga

diarahkan kepada pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah yang merupakan dampak dari terpusatnya distribusi dan alokasi serta pemanfaatan sumber daya di wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus merupakan solusi dalam mengurangi ketidakseimbangan antar wilayah.

3.1.1. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian
- d. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian.

3.1.2. Strategi Kementerian Pertanian

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global maka kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, onfarm, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian.

Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan research and development (R&D) dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas (yield) tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (biaya logistik). Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah serta distribusi pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di antaranya :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian
2. Peningkatan ketersediaan pangan
3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

b. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian

Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Adapun strategi yang dilakukan dari sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai tambah
2. Peningkatan daya saing pertanian

c. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin

pertanian. Adapun strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air
2. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida
4. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian

d. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian

Pengembangan SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian adalah sebagai berikut :

1. Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
2. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian
3. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional
5. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi
6. Penguatan kelembagaan petani

3.1.3. Program Kementerian Pertanian

Pada awal tahun 2024, Kementerian Keuangan menginisiasi perancangan kembali (redesign) penyederhanaan program di masing-masing Kementerian/Lembaga. Dengan adanya perancangan kembali (redesign) tersebut maka sistem penganggaran dan Program Indikatif Kementerian Pertanian pada tahun 2021-2024 akan berubah menjadi :

a. Dukungan Manajemen

Sasaran Program sebagai berikut :

- Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
- Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas
- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementan
- Meningkatnya kualitas pengawasan internal
- Meningkatnya maturitas SPIP.

b. Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- Termanfaatkannya teknologi dan inovasi pertanian

c. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian

d. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

- Meningkatnya ketersediaan pangan strategis
- Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen pertanian yang sesuai dengan kebutuhan
- Terjaminnya keamanan dan mutu pangan
- Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI sektor pertanian
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai kebutuhan.
- Meningkatnya lembaga distribusi pangan yang mandiri

- Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
 - Meningkatnya pengawasan pangan segar yang beredar
 - Aman dari ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan keamanan hayati.
 - Tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien.
- e. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- Meningkatnya daya saing komoditas pertanian
 - Meningkatnya Pertumbuhan ekspor pertanian

Pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan pertanian, serta pencapaian target sasaran utama membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran, serta penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Pendanaan pembangunan pertanian berasal dari pemerintah pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) dan dari sumber lain yaitu:

- a. Pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- b. Swasta, BUMN, dan BUMD;
- c. Investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA);
- d. Lembaga keuangan dan perbankan (skema kredit dan kredit komersial); dan
- e. Swadaya masyarakat.

Sumber dana pembangunan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat karena besarnya nilai dana yang dibutuhkan. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian sangatlah besar. Sebagian besar merupakan pembiayaan bersumber dari swasta, perbankan dan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir RENJA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Tahun 2024.

Tujuan dan Sasaran adalah tahapan untuk Perumusan Sasaran Strategis yang menunjukkan Tingkat Prioritas Tertinggi dan Utama dalam Perencanaan Pembangunan berupa Rencana Kerja Program/Kegiatan baik jangka menengah daerah maupun program/kegiatan setiap tahun berjalan terutama pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh selama 1 (satu) tahun, yakni yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata berupa peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta meningkatkan peran penyuluhan pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta membuka peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dalam rangka mendukung Kebijakan Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2024 yaitu "**Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak**". Untuk mendukung Kebijakan tersebut yaitu **Penguatan Ekonomi Masyarakat**, melalui Program-program Prioritas yang telah ditetapkan melalui SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, maka

tujuan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) dalam rangka Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Aceh yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Lanjutan mewujudkan *Good Government* dilingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, efektivitas *pengawasan* kinerja untuk pelayanan publik.
- b. Meningkatkan sistem distribusi sarana produksi (Saprodi) dan hasil panen agar memenuhi kaidah 6 (enam) Tepat, tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat tempat dan tepat guna. Sehingga upaya penambahan luas areal penanaman, meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dapat dicapai.
- c. Meningkatkan mutu hasil pertanian tanaman pangan (Penetapan Kawasan dan IP300), hortikultura dan perkebunan, Gepeuaman serta pengembangan pemasaran hasil produk pertanian unggulan daerah melalui penelitian, pelatihan, promosi di tingkat Daerah, Nasional dan Luar Negeri dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan penerapan prasarana dan sarana teknologi pertanian tepat guna dalam rangka peningkatan infrastruktur dan modernisasi pertanian perkebunan.
- e. Menumbuhkembangkan dan memantapkan sentra-sentra agribisnis sehingga membentuk kawasan komoditas spesifik lokasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berbasis korporasi.
- f. Peningkatan sistem peramalan, pengkajian, pengendalian dalam rangka penanggulangan organisme pengganggu tanaman pertanian dan perkebunan.
- g. Penguatan UPJA Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan membentuk brigade olah tanah, brigade tanam dan brigade panen serta pola kerja sama

- pengelolaan alsintan menuju modernisasi pertanian dan mewujudkan pola tanam serentak serta luas tambah tanam.
- h. Penguatan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan melalui Peningkatan Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Peningkatan Akreditasi Penyuluh Pertanian Lapangan.
 - i. Penguatan Peran dan Fungsi Teknis UPTD Lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, sebagai pendukung utama dalam peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
 - j. Penguatan Institusi Perbenihan Balai Benih Induk, Balai Benih Utama, Kebun-kebun induk perkebunan di sentra dan kawasan komoditas pertanian dan perkebunan serta menumbuh-kembangkan desa-desa mandiri benih dalam rangka kemandirian benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
 - k. Membuka peluang kerjasama integrasi lintas sektor guna menghadirkan korporasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan nilai tambah, pendapatan dan kemandirian petani.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RANKHIR RENJA Tahun 2024 serta Perkiraan Maju Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) serta RENSTRA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2023-2026, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021 – 2024. Program Spesifik SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh berdasarkan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**, serta penyesuaian sebagaimana yang tercantum dalam RPA dan RENSTRA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH;
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN;
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN;
4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN;
5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN;
6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN;

Adapun Rancangan Awal RENJA Pagu Indikatif Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 135.553.000.000.-** dan Berdasarkan **Hasil Analisis Kebutuhan Usulan Pagu Rancangan Akhir pada Tahun 2024 dibutuhkan sebesar Rp. 145.290.674.432** dengan Rincian Rencana Program/Kegiatan Tahun 2024 Rancangan Awal dan Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir) serta perkiraan maju tahun 2025, sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN (3).

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN (3.27).

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.27.01).

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp. 2.900.000.000- sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 1.545.600.000.- untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 3.100.000.000 terdiri dari 3 sub kegiatan pendukung antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, merupakan pendukung dari Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal

sebesar Rp. 1.200.000.000., sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 900.800.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 1.300.000.000., keluaran sub kegiatan Tersedianya Dokumen Perencanaan (Revisi dan Perubahan) Tahun 2024 sebanyak 4 Dokumen.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, merupakan pendukung dari Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 1.200.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 321.200.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 1.300.000.000, keluaran sub kegiatan Tersedianya Dokumen Perencanaan (Revisi dan Perubahan) Tahun 2024, Data Statistik dan Informasi Pertanian, sebanyak 4 Dokumen.

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, merupakan pendukung dari Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 500.000.000., sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp.323.600.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 500.000.000, keluaran sub kegiatan Tersedianya Dokumen Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan, sebanyak 2 Laporan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2024

ranwal pagu indikatif sebesar Rp. 81.917.000.000 sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 73.968.501.994 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 83.555.000.000 terdiri dari 1 sub kegiatan pendukung antara lain :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp. 81.917.000.000 sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 73.968.501.994 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 83.555.000.000, keluaran sub kegiatan Tersedianya gaji dan hak- hak pegawai sebanyak 645 orang.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp. 738.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 40.000.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 250.000.000 terdiri dari 3 sub kegiatan pendukung antara lain :

1. Sub Kegiatan Penadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Sub Kegiatan Penadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 488.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 0 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal tidak dianggarkan, keluaran sub kegiatan

Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 650 paket.

2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 150.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 25.000.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 150.000.000, keluaran sub kegiatan Termotivasinya sumber daya aparatur yang profesional dalam pelayanan publik sebanyak 15 orang.

3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Sub Kegiatan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 100.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 15.000.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 100.000.000, keluaran sub kegiatan Tersedianya Bahan sosialisasi menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 60 orang.

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp. 2.065.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 1.598.351.015 untuk

tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 2.065.000.000 terdiri dari 5 sub kegiatan pendukung antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 150.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 100.000.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 150.000.000., keluaran sub kegiatan Tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor sebanyak 20 Paket.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 750.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 853.351.015 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 750.000.000, keluaran sub kegiatan Tersedianya kebutuhan ATK, Makan dan minum sebanyak 11 Paket.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 220.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 200.000.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 220.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan sebanyak 11 Paket.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 145.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 20.000.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 145.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 6 Dokumen.

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, merupakan pendukung dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 800.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 425.000.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 800.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran sebanyak 1 Laporan.

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp. 1.500.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 282.750.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal

sebesar Rp. 750.000.000 terdiri dari 3 sub kegiatan pendukung antara lain:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 1.200.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran belum dianggarkan, untuk tahun 2025 rancangan pagu tidak dianggarkan. Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan sebanyak 2 unit.

2. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 1.000.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 232.750.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu tidak dianggarkan, keluaran sub kegiatan Tersedianya Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sebanyak 1 unit.

3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 500.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 50.000.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 750.000.000, keluaran sub kegiatan Jumlah Unit Sarana

dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sebanyak 5 unit.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp. 9.690.000.000- sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp.8.186.608.295 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 9.884.000.000 terdiri dari 4 sub kegiatan pendukung antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp.40.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 21.595.136 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp.41.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya kelancaran informasi 1 laporan.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 2.300.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 2.100.000.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 2.346.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 1 laporan.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 600.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 550.000.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 612.000.000, keluaran sub kegiatan Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 laporan.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, merupakan pendukung dari Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 6.750.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 5.515.013.159 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 6.885.000.000, keluaran sub kegiatan Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 1 laporan.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp. 5.556.000.000- sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 2.950.000.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 5.950.000.000 terdiri dari 2 sub kegiatan pendukung antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, merupakan pendukung dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 4.200.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp.2.250.000.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 4.200.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 437 unit.

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, merupakan pendukung dari Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 1.356.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 700.000.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 1.750.000.000, keluaran sub kegiatan Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 20 unit.

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (3.27.02).

- a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Kegiatan Pengawasan Peredaran Saran Pertanian merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp. 2.660.000.000- sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 27.834.177.195 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 2.780.000.000 terdiri dari 2 sub kegiatan pendukung antara lain :

1. Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian.

Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 460.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 8.256.843.280 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 530.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian sebanyak 1 laporan.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 2.200.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 1.205.240.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 2.250.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian sebanyak 1 dokumen.

b. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman merupakan kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp. 13.504.000.000- sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp.16.692.373.915 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp.7.657.000.000 terdiri dari 4 sub kegiatan pendukung antara lain :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih.

Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 1.000.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 16.692.373.915 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 1.200.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Sertifikat Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebanyak 6 sertifikat.

2. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan.

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 5.166.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 7.167.836.715 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 6.457.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan, dengan rencana target Produksi dan Produktivitas Perkebunan antara lain : **Kelapa Sawit** (target produksi **459.102 ton**), **Kelapa** (target

produksi **64.815 ton**), **Kopi** (target produksi **74.046 ton**), **Kakao** (target produksi **44.120 ton**), **Nilam** (target produksi **193 ton**), **Pinang** (target produksi **19.621 ton**), **Lada** (target produksi **195 ton**), **Cengkeh** (target produksi **5.445 ton**), **Tembakau** (target produksi **2.047 ton**), **Pala** (target produksi **6.756 ton**).

- c. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi.

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi merupakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp. 1.000.000.000 sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 1.679.720.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 1.300.000.000 terdiri dari 1 sub kegiatan pendukung antara lain :

1. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme.

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme., merupakan pendukung dari Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 1.000.000.000 sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 1.679.720.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 1.300.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Penyediaan Benih Bumber Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan, sebanyak 1 laporan.

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (3.27.03).

a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian merupakan kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp. 793.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 8.906.327.508 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 9.580.000.000 terdiri dari 5 sub kegiatan pendukung antara lain:

1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.

Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 4.770.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 3.000.800.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 5.480.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran, dengan rencana target Peningkatan Produksi dan Produktivitas komoditi Tanaman Pangan antara lain : **Padi** (target produksi **1.729.000 ton**), **Jagung** (target produksi **333.000 ton**), **Kedelai** (target produksi **611 ton**), **Ubi Kayu** (target produksi **44.611 ton**), **Kacang Tanah** (target produksi **3.000 ton**).

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani, merupakan pendukung dari Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 173.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 50.000.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 200.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian, sebanyak 1 dokumen.

3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani, merupakan pendukung dari Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 230.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 196.044.962 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 260.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air, sebanyak 1 dokumen.

4. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, merupakan pendukung dari Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 290.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 150.000.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 330.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Optimasi Lahan dan Perluasan Areal Pertanian, sebanyak 1 laporan.

5. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.

Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya, merupakan pendukung dari Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 100.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran belum dianggarkan, untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 100.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Optimasi Lahan dan Perluasan Areal Pertanian, sebanyak 5 unit.

6. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian.

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 2.568.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 5.509.482.546 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp.3.210.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, dengan rencana target Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Tahun 2024 antara lain : **Bawang Merah** (target produksi **9.366 ton**), **Cabai** (target produksi **112.458 ton**), **Kentang** (target produksi **14.688 ton**).

IV. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (3.27.05).

- a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi merupakan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana

Pertanian Provinsi, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp. 650.000.000- sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 9.535.339.800 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 670.000.000 terdiri dari 1 sub kegiatan pendukung antara lain:

1. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Sub Kegiatan Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 650.000.000- sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 9.535.339.800 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 670.000.000, keluaran sub kegiatan Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, seluas 25.855 Ha

V. Program Perizinan Usaha Pertanian (3.27.06).

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan penunjang kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp.1.000.000.000 sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 847.600.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal

sebesar Rp.1.200.000.000 terdiri dari 1 sub kegiatan pendukung antara lain :

1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 1.000.000.000 sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 847.600.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 1.200.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar sebanyak 1 laporan.

VI. Program Penyuluhan Pertanian (3.27.07).

- a. Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian merupakan Penunjang kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp.540.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 9.195.418.625 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp.648.000.000 terdiri dari 1 sub kegiatan pendukung antara lain:

1. Sub Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta.

Sub Kegiatan Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta, merupakan pendukung dari

Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 540.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 342.600.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 648.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Peningkatan Kualitas Sistem Penyuluh Pertanian/ Perkebunan sebanyak 80 orang.

b. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian merupakan Penunjang kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp.660.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 8.184.978.625 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp.792.000.000 terdiri dari 1 sub kegiatan pendukung antara lain :

1. Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.

Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 7.500.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 7.863.778.625 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 7.712.000.000, keluaran sub kegiatan Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Pertanian, sebanyak 3 unit.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal

sebesar Rp. 660.000.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 321.200.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 792.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sebanyak 12 kelompok.

c. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan merupakan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, pada tahun anggaran 2024 ranwal pagu indikatif sebesar Rp.667.840.000- sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 667.840.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 614.000.000 terdiri dari 1 sub kegiatan pendukung antara lain:

1. Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani.

Sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani, merupakan pendukung dari Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, pada tahun 2024 pagu indikatif rancangan awal sebesar Rp. 667.840.000, sedangkan hasil analisis kebutuhan anggaran Rankhir Renja sebesar Rp. 667.840.000 untuk tahun 2025 rancangan pagu awal sebesar Rp. 614.000.000, keluaran sub kegiatan Terlaksananya Pendampingan Manajemen Korporasi Petani, sebanyak 4 unit.

Dari berbagai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Rancangan Akhir Tahun 2024 dan Rencana Maju RKPA Tahun 2025, rincian rancangan awal pada *Tabel T-C.33 berikut :*

RANWAL RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH TAHUN 2024

Tabel T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja			Rancangan Akhir RENJA Tahun 2024							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								145.290.674.432					139.507.000.000
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								88.971.811.304					106.554.000.000
1.01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1.545.600.000					3.100.000.000
1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Persentase Laporan Capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib).	Tersedianya Dokumen Perencanaan (Revisi dan Perubahan) Tahun 2024.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	90%	4 Dokumen	4 Dokumen	900.800.000	PAD		Tersedianya Dokumen Perencanaan (Revisi dan Perubahan) Tahun 2024.	90%	1.300.000.000
1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Laporan Capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib).	Tersedianya Dokumen Perencanaan (Revisi dan Perubahan) Tahun 2024, Data Statistik dan Informasi Pertanian.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Banda Aceh	90%	4 Dokumen	4 Dokumen	321.200.000	PAD		Tersedianya Dokumen Perencanaan (Revisi dan Perubahan) Tahun 2024, Data Statistik dan Informasi Pertanian.	90%	1.300.000.000
1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib).	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Banda Aceh	90%	2 Laporan	2 Laporan	323.600.000	PAD		Persentase Laporan Capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan	90%	500.000.000
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								73.968.501.994					83.555.000.000
1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan.	Tersedianya gaji dan hak-hak pegawai	Tersedianya gaji dan hak-hak pegawai	Banda Aceh	98%	645 Orang	645 Orang	73.968.501.994	FAA/DAU		Tersedianya gaji dan hak-hak pegawai	98%	83.555.000.000
1.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah								48.000.000					258.000.000
1.05.02	Penataan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Disiplin Aparatur Sipil Negara.	Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Banda Aceh/ Nasional	95%	650 Pkt	650 Pkt	0			Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).	95%	0
1.05.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi.	Temotivasinya sumber daya aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Banda Aceh	95%	15 Org	15 Org	25.000.000	SPAA		Temotivasinya sumber daya aparatur yang profesional dalam pelayanan publik	95%	150.000.000
1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi.	Tersedianya Bahan sosialisasi menunt peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Banda Aceh	95%	60 Org	60 Org	15.000.000	SPAA		Tersedianya Bahan sosialisasi menunt peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	95%	100.000.000
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.598.351.015					2.065.000.000
1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Kelengkapan Saran dan Peralatan Aparatur.	Tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	Banda Aceh	98%	20 Paket	20 Paket	100.000.000	OTSUS		Tersedianya kebutuhan instalasi listrik dan alat penerangan gedung kantor	98%	150.000.000
1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Kelengkapan Saran dan Peralatan Aparatur.	Terfaksananya Penyediaan kebutuhan ATK, Makan dan minum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	95%	11 Paket	11 Paket	853.351.015	DAU		Terfaksananya Penyediaan kebutuhan ATK, Makan dan minum	95%	750.000.000
1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat Kelengkapan Saran dan Peralatan Aparatur.	Terfaksananya Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Banda Aceh	95%	11 Paket	11 Paket	200.000.000	OTSUS		Terfaksananya Penyediaan Barang Cetak	95%	220.000.000
1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Kelengkapan Saran dan Peralatan Aparatur.	Terfaksananya Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Banda Aceh	90%	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	SPAA		Terfaksananya Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	90%	145.000.000
1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Kelengkapan Saran dan Peralatan Aparatur.	Terfaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran .	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	90%	1 Laporan	1 Laporan	425.000.000	DAU		Terfaksananya sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi dalam pencapaian kinerja yang tepat waktu dan tepat sasaran .	90%	800.000.000

RANWAL RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2024

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rancangan Akhir RENJA Tahun 2024						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja		Kebijakan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Telok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								282.750.000					750.000.000
1.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Banda Aceh	95%	2 Unit	2 Unit	0			Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	95%	0
1.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Banda Aceh	95%	1 Unit	1 Unit	232.750.000	OTSUS		Tersedianya Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	95%	0
1.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Banda Aceh	95%	5 Unit	5 Unit	50.000.000	DAU		Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	95%	750.000.000
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								8.186.608.295					9.884.000.000
1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banda Aceh	95%	1 Laporan	1 Laporan	21.595.136	PAD		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95%	41.000.000
1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Banda Aceh	95%	1 Laporan	1 Laporan	2.100.000.000	OTSUS		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	95%	2.346.000.000
1.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	90%	1 Laporan	1 Laporan	550.000.000	PAD-DAU		Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	90%	612.000.000
1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	90%	1 Laporan	1 Laporan	5.515.013.159	OTSUS		Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90%	6.885.000.000
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.950.000.000					5.950.000.000
1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertizinannya	Banda Aceh	95%	437 Unit	437 Unit	2.250.000.000	OTSUS		Terlaksananya Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertizinannya	95%	4.200.000.000
1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banda Aceh	95%	20 Unit	20 Unit	700.000.000	OTSUS		Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	95%	1.750.000.000
1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								400.000.000					1.000.000.000
1.10	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Kelengkapan Saran dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Banda Aceh	90%	1 Unit Layanan	1 Unit Layanan	400.000.000	BLUD		Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	90%	1.000.000.000
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								27.834.177.195					11.737.000.000
1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian								8.462.983.280					2.780.000.000
1.01	01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatnya indeks yang diterima petani (t) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan	Terlaksananya Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kab./Kota	90%	1 Laporan	1 Laporan	8.256.843.280	OTSUS-DAU		Terlaksananya Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	90%	530.000.000
1.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Meningkatnya indeks yang diterima petani (t) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Kab./Kota	95%	12 Dokumen	1 Dokumen	1.205.240.000	OTSUS-DAU		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	95%	2.250.000.000
1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman								16.692.373.915					7.657.000.000
1.02	01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Meningkatnya indeks yang diterima petani (t) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan	Terlaksananya Sertifikat Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Sertifikat Benih	Kab./Kota	95%	545 Sertifikat	545 Sertifikat	9.524.537.200	SOTSUS		Terlaksananya Sertifikat Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	95%	1.200.000.000
1.02	02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Meningkatnya indeks yang diterima petani (t) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Kab./Kota	95%	1 Laporan	1 Laporan						
1.02	03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Meningkatnya indeks yang diterima petani (t) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan	Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Kab./Kota	90%	1 Dokumen	1 Dokumen						
1.02	04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Meningkatnya indeks yang diterima petani (t) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Kab./Kota	95%	1 Dokumen	1 Dokumen						
1.02	05 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Meningkatnya indeks yang diterima petani (t) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan	Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 5 tepat	Kab./Kota	95%	1 Laporan	1 Laporan	7.167.836.715	DBHCHT/ SDBHCHT/ OACEH/ SOTSUS		Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	95%	6.457.000.000

RANWAL RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

TAHUN 2024

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja			Rancangan Akhir RENJA Tahun 2024						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target capaian kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi								1.678.720.000					1.300.000.000
1.03	04 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Meningkatnya indeks yang diterima petani (R) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan	Terlaksananya Penyediaan Benih Bumber Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Kab./Kota	90%	1 Laporan	1 Laporan	1.679.720.000	SOTSUS		Terlaksananya Penyediaan Benih Bumber Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	90%	1.300.000.000
83 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									8.906.327.508				9.580.000.000	
1.01 Penataan Prasarana Pertanian									8.906.327.508				9.580.000.000	
1.01	01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kab./Kota	95%	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.800.000	OTSUS-DAU		Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	95%	5.480.000.000
1.01	03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	Kab./Kota	95%	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	DAU		Terlaksananya Peningkatan Prasarana Pertanian	95%	200.000.000
1.01	04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	Kab./Kota	95%	1 Dokumen	1 Dokumen	196.044.962	DAU		Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	95%	260.000.000
1.01	09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Optimalisasi Lahan dan Perluasan Areal Pertanian	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Optimalisasi Lahan dan Perluasan Areal Pertanian	Kab./Kota	95%	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	OTSUS		Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Optimalisasi Lahan dan Perluasan Areal Pertanian	95%	330.000.000
1.01	10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terpeliharanya Fasilitas Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Optimalisasi Lahan dan Perluasan Areal Pertanian	Jumlah Gedung UPTD Pertanian dan Pemantapan Lahan Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Kab./Kota	95%	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0		Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Optimalisasi Lahan dan Perluasan Areal Pertanian	95%	100.000.000
1.01	13 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terpeliharanya Fasilitas Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang memanfaatkan	Kab./Kota	95%	1 Dokumen	1 Dokumen	5.509.482.546	OTSUS-DAU		Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	95%	3.210.000.000
85 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									9.535.339.800				670.000.000	
01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi									9.535.339.800				670.000.000	
01.	01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab./Kota	95%	25.855 Ha	25.855 Ha	9.535.339.800	OTSUS-DAK		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	95%	670.000.000
86 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									847.600.000				1.200.000.000	
1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									847.600.000				1.200.000.000	
1.01	03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan terawasinya usaha perkebunan besar	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Kab./Kota	90%	1 Laporan	1 Laporan	847.600.000	OTSUS		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan besar	90%	1.200.000.000
87 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									9.195.416.625				9.766.000.000	
1.01 Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian									342.600.000				648.000.000	
1.01	04 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian.	Tersedia dan Meningkatnya Kapasitas Penyuluh pertanian.	Terlaksananya Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian.	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi.	Kab./Kota	95%	80 Orang	80 Orang	342.600.000	OTSUS		Terlaksananya Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian.	95%	648.000.000
1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian									8.164.978.625				8.504.000.000	
1.02	01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.	Tersedianya Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.	Terlaksananya Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab./Kota	90%	3 Unit	3 Unit	7.863.778.625	OTSUS		Terlaksananya Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.	90%	7.712.000.000
1.02	02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Tersedianya hasil penyuluhan penerapan praktik pertanian	Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kab./Kota	90%	12 Kelompok	12 Kelompok	321.200.000	OTSUS		Terlaksananya Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	90%	792.000.000
1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan									667.840.000				614.000.000	
1.03	06 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Terbentuk dan Menguatnya Kelembagaan Korporasi Petani	Terselenggaranya Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Kooperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Kab./Kota	95%	4 Unit	4 Unit	667.840.000	SOTSUS		Terselenggaranya Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	95%	614.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2024 Disusun Berdasarkan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Rencanakan pada Rencana Akhir untuk pembiayaan Pembangunan Pertanian serta Hasil Analisis Kebutuhan Pembiayaan dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, sebagai berikut :

Prog	Keg	Sub Kegiatan	Rancangan Awal Renja 2024	Rankhir Renja 2024
		Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.	135.553.000.000	145.290.674.432
01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	106.566.000.000	88.971.811.304
	01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.900.000.000	1.545.600.000
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	1.200.000.000	900.800.000
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.200.000.000	321.200.000
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000.000	323.600.000
	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.917.000.000	73.968.501.994
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.917.000.000	73.968.501.994
	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	738.000.000	40.000.000
	02	Pengadaan Pakaian Dinas.	488.000.000	0
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	150.000.000	25.000.000
	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	100.000.000	15.000.000
	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.065.000.000	1.598.351.015
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	150.000.000	100.000.000
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	750.000.000	853.351.015
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	220.000.000	200.000.000
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	145.000.000	20.000.000
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	800.000.000	425.000.000
	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.700.000.000	282.750.000
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	1.200.000.000	0
	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	1.500.000.000	232.750.000
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	500.000.000	50.000.000
	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.690.000.000	8.186.608.295
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000	21.595.136
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.300.000.000	2.100.000.000
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	600.000.000	550.000.000
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.750.000.000	5.515.013.159

RANKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2024

Prog	Keg	Sub Kegiatan	Rancangan Renja 2024	Hasil Analisis Kebutuhan 2024
	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.556.000.000	2.950.000.000
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.200.000.000	2.250.000.000
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.356.000.000	700.000.000
	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.000.000.000	400.000.000
	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.	1.000.000.000	400.000.000
02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.		17.164.000.000	27.834.177.195
	01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2.660.000.000	9.462.083.280
	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian.	460.000.000	8.256.843.280
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian.	2.200.000.000	1.205.240.000
	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	13.504.000.000	16.692.373.915
	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih.	1.000.000.000	9.5245.37.200
	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura.	2.568.000.000	
	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan.	4.770.000.000	
	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan.	5.166.000.000	
	05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		7.167.836.715
	03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	1.000.000.000	1.679.720.000
	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme.	1.000.000.000	1.679.720.000
03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.		793.000.000	8.906.327.508
	01	Penataan Prasarana Pertanian	793.000.000	8.906.327.508
	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		3.000.800.000
	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani.	173.000.000	50.000.000
	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani.	230.000.000	196.044.962
	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.	290.000.000	150.000.000
	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.	100.000.000	0
	13	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian		5.509.482.546
05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.		690.000.000	9.535.339.800
	01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	690.000.000	9.535.339.800
	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	690.000.000	9.535.339.800

RANKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
TAHUN 2024

06	Program Perizinan Usaha Pertanian		1.000.000.000	847.600.000
	01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.	1.000.000.000	847.600.000
	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1.000.000.000	847.600.000

Prog	Keg.	Sub Kegiatan	Rancangan Renja 2024	Hasil Analisis Kebutuhan 2024
07	Program Penyuluhan Pertanian.		9.380.000.000	9.195.418.625
	01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	540.000.000	342.600.000
	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta.	540.000.000	
	04	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian.		342.600.000
	02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	660.000.000	8.184.978.625
	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.		7.863.778.625
	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.	660.000.000	321.200.000
	03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	8.180.000.000	667.840.000
	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi.	480.000.000	
	02	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani.	200.000.000	
	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.	7.500.000.000	
	06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani		667.840.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun 2024 ini dengan Tujuan, Sasaran, Strategi serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Merupakan Rencana Awal RKPA serta Hasil Analisis Pagu Indikatif, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Diharapkan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) 2024 ini agar menjadi Dokumen Perencanaan dan Acuan Kerja untuk Menyusun Rencana Kerja (RENJA) Renja dan Penetapan PPAS Tahun 2024 serta sebagai pedoman bagi seluruh Jajaran Bidang Teknis, UPTD dan Sekolah Kedinasan Pertanian Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Secara lebih spesifik, penjabaran mengenai Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-ABPA) Tahun 2024.

Sebanyak 6 Program, 16 Kegiatan serta (40) Sub Kegiatan yang dijabarkan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 serta besaran Pagu Indikatif berdasarkan Hasil Analisis Kebutuhan sebesar **Rp. 145.290.674.432,-** sebagai acuan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024. Sehubungan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Aceh dan dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Melalui Renja ini dapat terlihat bahwa dari 6 (enam) Program direncanakan pagu

indikatif pelaksanaan Program/Kegiatan ini memiliki berbagai perubahan yang terjadi dan mempengaruhi pembangunan bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian dan Perkebunan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Dengan adanya Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini, diharapkan pada Penyusunan Dokumen Rancangan Kerja serta Penetapan PPAS melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan bidang Pertanian dan Perkebunan Aceh, apabila dipenuhinya target dan pendanaan yang sesuai dengan program/kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2024 ini.

